

**PENGARUH ALOKASI PRO-POOR BUDGET
TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SEBAGAI
VARIABEL MODERASI DITINJAU DARI EKONOMI SYARIAH**

Oleh: Meri Lustianah

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya kenaikan tingkat kemiskinan di Banten yang disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM terutama mengenai tingkat pendidikan dan kesehatan sehingga berpengaruh dengan keberhasilan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel (X_1) alokasi pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), karena nilai t hitung sebesar 2,830 lebih besar dari nilai t Tabel yaitu 1,699, dan memiliki pengaruh sebesar 29,6%. Selanjutnya variabel (X_2) alokasi kesehatan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), karena nilai t hitung sebesar 10,287 lebih besar dari nilai t tabel yaitu 1,699, serta memiliki pengaruh sebesar 84,8%. Selanjutnya alokasi pro poor budget (pendidikan) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) setelah dimoderasi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena nilai t hitung sebesar 8,111 lebih besar dari nilai t tabel yaitu sebesar 1,699, serta memiliki pengaruh sebesar 72,5%. Selanjutnya alokasi pro poor budget (kesehatan) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) setelah dimoderasi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena nilai t hitung sebesar 3,132 lebih besar dari nilai t tabel yaitu sebesar 1,699, serta memiliki pengaruh sebesar 34,1%.

Kata Kunci: APBD, IPM, dan PAD

A. Pendahuluan

Perencanaan pembangunan ekonomi bukan dari suatu daerah, melainkan perencanaan pembangunan yang digunakan untuk suatu daerah. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumber daya publik yang tersedia di daerah dan untuk memperbaiki kapasitas

sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber dayanya secara bertanggung jawab. Melalui perencanaan pembangunan ekonomi daerah, suatu daerah dilihat secara keseluruhan sebagai suatu unit ekonomi (*economic entity*) yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang berinteraksi satu sama lain.¹

Provinsi Banten ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Banten dengan wilayah meliputi Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Cilegon dan beribukotakan Serang. Dengan berdirinya Provinsi Banten diharapkan dapat memberikan perubahan baik kepada rakyat Banten khususnya. Perkembangan kondisi sosial ekonomi penduduk Provinsi Banten, ternyata kondisi peningkatannya berjalan agak lamban. Maka kondisi ini sebenarnya memperlihatkan sejauh mana upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan terutama kinerja dalam menyelenggarakan pembangunan serta maksimalisasi alokasi belanja APBD sebagai modal utama pembangunan

Hal utama yang memicu naiknya tingkat kemiskinan di Banten adalah terjadinya inflasi dan tidak didukung oleh peningkatan daya beli masyarakat. Pada periode September 2012 - Maret 2013, tingkat inflasi di Banten sebesar 3,80 persen. Sedangkan pada periode Maret - September 2013, tingkat inflasi sebesar 5,76 persen. Inflasi yang cukup tinggi pada periode Maret - September 2013 dikarenakan adanya kenaikan harga BBM pada bulan Juni 2013. Inflasi pada bahan makanan juga cukup tinggi yaitu 6,06 persen pada periode ini. Harga bahan makanan melonjak sehingga menyulitkan masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan kalori sebanyak 2.100 kkal per hari.²

Selain dari tingkat inflasi yang memicu kemiskinan di Banten, kualitas Sumber Daya Manusia juga berperan penting.

¹ Mudrajat Kuncoro, *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*, (Jakarta: PT Geloran Aksara Pratama, 2014), h.,81

² BPS Laporan Eksekutif | Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Banten Maret 2015

Karena dengan kualitas pendidikan yang memadai serta standar hidup yang layak maka akan menciptakan SDM yang Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam aktivitas kehidupan, terutama aktivitas kegiatan ekonomi. Maju mundurnya suatu daerah, biasanya ditentukan oleh tingkat sumber daya manusianya. Sumber daya manusia merupakan salah satu determinan yang sangat penting dalam pembangunan. Hal ini mengingat bahwa manusia adalah penggerak dalam pembangunan, yang mengantisipasi masalah, membuat perencanaan, menggali sumber daya alam, mengakumulasi dana, membangun organisasi sosial, ekonomi dan politik, serta meletakkan semuanya dalam satu wadah “pembangunan”.³

Kemiskinan suatu daerah berpengaruh dengan keberhasilan pembangunan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kita mengenal pula istilah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan suatu indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu pembangunan sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM sendiri dapat digunakan sebagai ukuran kemajuan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

B. Kajian Teoritis

1. Pengertian *Pro Poor Budget*

Pro poor budget dapat didefinisikan sebagai anggaran yang dibuat untuk kepentingan rakyat miskin.⁴ Anggaran Pro Rakyat Miskin (*Pro Poor Budget*) merupakan suatu tindakan politik yang bertujuan untuk mengalokasikan hak-hak dan sumber daya kepada individu, organisasi dan wilayah yang terpinggirkan oleh pasar dan negara. Untuk mengukur masyarakat yang berada di suatu daerah

³ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro* (Yogyakarta, Graha Ilmu: 2008), h. 20-25

⁴ Abdul Manan dan A. Maftuchan, *Anggaran Pro Rakyat Miskin: Panduan untuk Jurnalis* (Jakarta: Perkumpulan Prakarsa, 2010), h. 23.

tergolong miskin atau tidak, dapat dilihat dari hak atas kesehatan dan hak atas pendidikan.⁵

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran negara yang digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran negara dalam sistem pemerintahan Islam digunakan untuk:

- a. Penyebaran Islam.
- b. Pendidikan, kebudayaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, Rasulullah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
- c. Pembangunan infrastruktur.
- d. Pembangunan armada perang.
- e. Penyediaan layanan kesejahteraan sosial

2. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan kata lain *Human Development Index (HDI)* pertama kali dikembangkan pada tahun 1990 oleh seorang ekonom India bernama Amartya Sen dan seorang ekonom Pakistan Mahbub ul Haq, serta dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari *London School of Economics*. IPM dalam program pembangunan dipakai sebagai alat ukur resmi keberhasilan pembangunan berbagai negara di dunia.

Amartya Sen mengistilahkan IPM sebagai “pengukuran terbuka” karena sifat pengukurannya lebih berfokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna daripada hanya sekedar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan. Indeks ini memiliki makna yang sangat luas dalam kehidupan manusia, mencerminkan status

⁵ Satya Arinanto, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 153.

kemampuan dari manusia itu sendiri yang diukur dari tiga dimensi, yaitu diantaranya:

- 1) Umur panjang dan sehat yang mengukur peluang hidup.
- 2) Berpengetahuan dan berketerampilan.
- 3) Akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak.

Pelaksanaan pembangunan seutuhnya senantiasa menempatkan manusia sebagai titik sentral dalam pembangunan. Dalam kerangka ini maka pembangunan ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan partisipasi rakyat dalam semua proses dan kegiatan pembangunan. Pada dasarnya IPM mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dari penduduk, yaitu:

- 1) Umur panjang dan sehat yang mengukur peluang hidup.
- 2) Berpengetahuan dan berketarampilan.
- 3) Akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak.

Perubahan dalam Indeks Pembangunan Manusia dipengaruhi oleh tiga indikator, yaitu: indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks daya beli. Oleh karena itu, perubahan dalam IPM terkait erat dengan perubahan ketiga indeks tersebut. Dalam perhitungan indeks kesehatan, digunakan angka harapan hidup sebagai indikator.

3. Pendapatan Asli Daerah

Komponen penerimaan daerah yang dapat direkayasa oleh pemerintah daerah dalam rangka membuat anggaran yang pro orang miskin adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengingat sumber PAD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah pajak dan retribusi daerah, maka pemerintah daerah dapat membuat kebijakan anggaran yang bersifat pro orang miskin antara lain dengan:

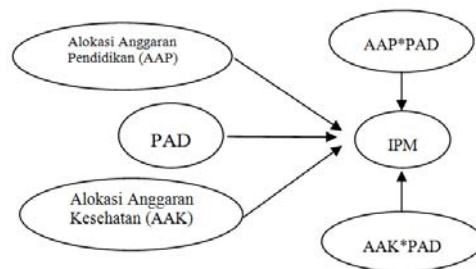
- a. Tidak membuat kebijakan pungutan daerah yang secara langsung membebani orang miskin. Misalnya dengan

membebaskan mereka dari keharusan membayar pengobatan di Puskesmas, SPP, retribusi KTP, dan sebagainya.

- b. Tidak membuat kebijakan pungutan daerah yang secara tidak langsung membebani orang miskin. Misalnya pajak dan atau retribusi daerah yang dikenakan terhadap hasil produksi pertanian, perikanan, peternakan, industri rumah tangga, industri kecil, yang diproduksi oleh kelompok masyarakat miskin.
- c. Jika dua pilihan tersebut tidak dapat dilaksanakan, setidaknya pemerintah daerah dapat membuat kebijakan pungutan yang bersifat progressif, yakni mengenakan tarif khusus (lebih murah) terhadap kelompok masyarakat yang dikategorikan miskin.

4. Kerangka Pemikiran

Model penelitian yang menggambarkan suatu kerangka konseptual sebagai panduan sekaligus alur berfikir tentang pengaruh alokasi *pro poor budget* terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variable moderasi, yang dapat dilihat pada hubungan antar variabel. Laju pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pembangunan manusia. Pada hakekatnya pembangunan adalah pembangunan manusia, sehingga perlu diprioritaskan alokasi belanja untuk keperluan ini dalam penyusunan anggaran.⁶



⁶ Christy, F Andrea dan Priyo H Adi, *Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, dan Kualitas Pembangunan Manusia*, (Jurnal, Daring, Ekonomi Akuntansi, Vol. 7 No. 19, Tahun 2012, h. 25).

5. Pengajuan Hipotesis

- a. Pengaruh Alokasi *Pro Poor Budget* (Pendidikan) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
H1. Alokasi dana *pro poor budget* (pendidikan) diduga memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- b. Pengaruh Alokasi *Pro Poor Budget* (Kesehatan) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
H2. Alokasi dana *pro poor budget* (kesehatan) diduga memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- c. Pengaruh Alokasi *Pro Poor Budget* (Pendidikan) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebagai Variabel Moderasi
H3. Dengan dimoderasi oleh Pendapatan Asli Daerah diharapkan alokasi dana *pro poor budget* (pendidikan) memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- d. Pengaruh Alokasi *Pro Poor Budget* (Kesehatan) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebagai Variabel Moderasi
H4. Dengan dimoderasi oleh Pendapatan Asli Daerah diharapkan alokasi dana *pro poor budget* (kesehatan) memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

C. Metode Penelitian

Dalam melakukan pengambilan data penelitian ini yaitu anggaran nominal riil belanja langsung APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011 sampai dengan tahun 2014 dari DPPKD Provinsi Banten, dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah bidang pendidikan dan bidang kesehatan Provinsi Banten. Data Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 yang dipublikasikan BPS Provinsi Banten.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas, obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁷ Populasi dalam penelitian ini adalah Anggaran Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Banten. Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti.⁸ Teknik yang digunakan dalam penarikan sampel pada penelitian ini yaitu dengan teknik penarikan sampel *purposive*. *Purposive sampling method* (pemilihan sampel bertujuan) merupakan teknik *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini agar dalam pelaksanaan penelitian mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya atau penentuan sampel untuk tujuan tertentu. Seperti data yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah APBD Provinsi Banten (alokasi pendidikan dan kesehatan), sebagai variabel independen (X_1 dan X_2). Selanjutnya, variabel dependen adalah Indeks Pembangunan Manusia (Y) dan variabel moderasi adalah Pendapatan Asli Daerah. Data yang diambil merupakan data yang mempunyai keterkaitan satu sama lainnya. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif yaitu suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui.⁹ Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model regresi yaitu analisis yang mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, yaitu hubungan dalam bentuk persamaan yang menghubungkan antara

⁷ Sugiono, *Metode Penelitian*, (Bandung:Alfabet, 2011), h. 120.

⁸ Dwi Priyatno, *Paham Analisis Statistik Data dengan SPSS*, (Yogyakarta: MediaKom, 2010), h. 8.

⁹ Moh Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*,...h. 171.

variabel terikat (Y) dengan dua atau lebih variabel bebas ($X_1, X_2, \dots$) dalam suatu persamaan linier.

Agar model regresi berganda yang penulis gunakan dapat diinterpretasikan dengan baik, maka harus menggunakan asumsi *Best Linier Unbiased Estimator (BLUE)*.

1. Uji asumsi klasik¹⁰

a. Uji Normalitas

Uji normalitas data adalah uji untuk mengukur apakah data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal, sehingga dapat dipakai dalam statistik parametrik. Tujuan dilakukannya uji normalitas tentu saja untuk mengetahui apakah suatu variabel normal atau tidak.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.150

Dari hasil Tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,150. Karena nilai signifikansi lebih dari 0,05 ($0,150 > 0,05$), maka nilai residual tersebut berdistribusi normal. Artinya data ini berdistribusi normal. Untuk pengujian normalitas dapat dilihat melalui grafik p plot dan Tabel signifikansi.

b. Uji Multikolinieritas

Multikolinearitas adalah keadaan di mana terjadi hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna antara variabel independen dalam model regresi. Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antara variabel independen dalam model regresi.

¹⁰ Duwi Priyatno, *Paham Analisa Statistik Data dengan SPSS*, (Yogyakarta: Media Kom, 2010), h. 81-87.

Model	Tolerance	VIF	Hasil	Kesimpulan
Pendidikan (X_1)	0.772	1.296	Tol > 0.1, VIF < 10 (0.772 > 0.1, 1.296 < 10)	Bebas Multikoloniaritas
Kesehatan (X_2)	0.772	1.296	Tol > 0.1, VIF < 10 (0.772 > 0.1, 1.296 < 10)	Bebas Multikoloniaritas

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai toleransi untuk variabel X_1 (pendidikan) dan variabel X_2 (kesehatan) sebesar 0,772. Sementara itu, nilai VIF untuk variabel X_1 (pendidikan) dan variabel X_2 (kesehatan) masing-masing sebesar 1,296. Dari ke dua variabel independen tersebut menunjukkan bahwa variabel X_1 (pendidikan) dan variabel X_2 (kesehatan) memiliki nilai toleransi lebih dari 0,10 ($0,772 > 0,10$) dan memiliki nilai *varian inflation factor* (VIF) kurang dari 10 ($1,296 < 10$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas pada model regresi dalam penelitian ini.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas, untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi. Variabel independen yaitu Pendidikan (variabel X_1) dan Kesehatan (Variabel X_2) dan variabel dependen yaitu Indeks Pembangunan Manusia (variabel Y) serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel moderasi, dalam model regresi ditemukan tidak adanya heteroskedastisitas.

Variabel	Unstandardized Residual			Kesimpulan
	N	Sig. (2-tailed)	Hasil	
Pendidikan (X_1)	32	0.345	Uns. Residual > 0.05 (0.345 > 0.05)	Bebas Heteroskedastisitas
Kesehatan (X_2)	32	0.057	Uns. Residual > 0.05 (0.057 > 0.05)	Bebas Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil pada Tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai korelasi kedua variabel independen yaitu Pendidikan (variabel X_1) dan Kesehatan (Variabel X_2) serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel moderasi berdasarkan nilai unstandardized residual memiliki signifikansi lebih dari 0,05. Pada variabel X_1 (Pendidikan) memiliki nilai sebesar 0,345 dan pada variabel X_2 (Kesehatan) memiliki nilai sebesar 0,057. Oleh karena itu, jika nilai Sig. (0,345 dan 0,057) lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini.

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidak adanya korelasi yang terjadi antara residual pada suatu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus dipenuhi adalah tidak adanya autokorelasi pada model regresi.

DW	d_U	$4 - d_U$	Kesimpulan
1.843	1,573	2.427	Bebas Autokorelasi Positif

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui nilai *Durbin-Waston* (DW) sebesar 1,843. Hal ini menunjukkan bahwa nilai DW lebih kecil dari nilai $4 - d_u$. Karena nilai DW terletak antara $d_u < DW < 4 - d_u$ ($1,573 < 1,843 < 4 - 1,573$) maka H_0 ditolak. Hal tersebut berarti bahwa, dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi pada model regresi.

2. Uji t (t-test)

Uji t merupakan suatu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah koefisien regresi signifikan atau tidak.¹¹

¹¹ Nachrowi Djalal, *Penggunaan Teknik Ekonometri*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 24.

Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan antara t hitung dengan t tabel, dengan taraf kepercayaan atau taraf signifikasi sebesar 5 persen (0.05). Adapun t hitung dapat dicari dari hasil perhitungan SPSS dan t tabel dapat dicari dari tabel t . dengan kesimpulan hasil uji sebagai berikut:

- a. Jika $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $\text{Sig. } t < 0.05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, ini berarti variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan $\text{Sig. } t > 0.05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, ini berarti secara parsial tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Pembahasan dan Pengujian Hipotesis 1 (H_1)

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian melalui aplikasi SPSS 16.0, pada hipotesis satu (H_1) dapat dijelaskan bahwa alokasi *pro poor budget* (pendidikan) memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini berdasarkan data yang diolah dan disajikan dalam Tabel 4.11, dimana nilai t hitung sebesar 2,830 lebih besar dari nilai t Tabel yaitu sebesar 1,699, dan memiliki pengaruh sebesar 29,6%. Dengan demikian hipotesis satu (H_1) pada hasil penelitian ini dapat diterima.

2. Pembahasan dan Pengujian Hipotesis 2 (H_2)

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian melalui aplikasi SPSS 16.0, pada hipotesis dua (H_2) dapat dijelaskan bahwa alokasi *pro poor budget* (kesehatan) memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini berdasarkan data yang diolah dan disajikan dalam Tabel 4.13, dimana nilai t hitung sebesar 10,287 lebih besar dari nilai t Tabel yaitu sebesar 1,699, dan

memiliki pengaruh sebesar 84,8%. Dengan demikian hipotesis dua (H_2) pada hasil penelitian ini dapat diterima.

3. Pembahasan dan Pengujian Hipotesis 3 (H_3)

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian melalui aplikasi SPSS 16.0, pada hipotesis tiga (H_3) dapat dijelaskan bahwa alokasi *pro poor* dana untuk pendidikan setelah dimoderasi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini berdasarkan data yang diolah dan disajikan dalam Tabel 4.15, dimana nilai t hitung sebesar 8,111 lebih besar dari nilai t Tabel yaitu sebesar 1,699, dan memiliki pengaruh sebesar 72,5%. Dengan demikian hipotesis tiga (H_3) pada hasil penelitian ini dapat diterima.

4. Pembahasan dan Pengujian Hipotesis 4 (H_4)

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian melalui aplikasi SPSS 16.0, pada hipotesis empat (H_4) dapat dijelaskan bahwa alokasi *pro poor* dana untuk kesehatan setelah dimoderasi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini berdasarkan data yang diolah dan disajikan dalam Tabel 4.17, dimana nilai t hitung sebesar 3,132 lebih besar dari nilai t Tabel yaitu sebesar 1,699, dan memiliki pengaruh sebesar 34,1%. Dengan demikian hipotesis empat (H_4) pada hasil penelitian ini dapat diterima.

E. Daftar Pustaka

Satya Arinanto, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)

Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro* (Yogyakarta, Graha Ilmu: 2008)

- Abdul Manan dan A. Maftuchan, *Anggaran Pro Rakyat Miskin: Panduan untuk Jurnalis* (Jakarta: Perkumpulan Prakarsa, 2010)
- BPS Laporan Eksekutif | Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Banten Maret 2015
- Christy, F Andrea dan Priyo H Adi, *Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, dan Kualitas Pembangunan Manusia*, (Jurnal, Daring, Ekonomi Akuntansi, Vol. 7 No. 19, Tahun 2012)
- Duwi Priyatno, *Paham Analisa Statistik Data dengan SPSS*, (Yogyakarta: Media Kom, 2010)
- Dwi Priyatno, *Paham Analisis Statistik Data dengan SPSS*, (Yogyakarta: MediaKom, 2010)
- Mudrajad Kuncoro, *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*, (Jakarta: PT Geloran Aksara Pratama, 2014)
- Nachrowi Djalal, *Penggunaan Teknik Ekonometri*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Sugiono, *Metode Penelitian*, (Bandung:Alfabet, 2011)